

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KREDIT KOMSUMTIF OLEH PNS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru*



Oleh:

NANA MARYANA
NIM. 10525001188

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2009**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: **“Efektivitas Penggunaan Kredit Konsumtif oleh PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Dumai Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”**.

Lokasi penelitian adalah Dinas Kesehatan Kota Dumai, yang beralamat di jalan Pattimura No 5 yang berada di kecamatan Dumai Barat. Merupakan instansi pemerintah yang berperan menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang kesehatan dan kesejahteraan daerah.

Penulis melakukan penelitian langsung pada Dinas Kesehatan Kota Dumai. Sebagai populasi adalah Ka. Dinas Kesehatan ditambah para pegawai yang keseluruhannya sebanyak 60 orang, dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil sample sebanyak 50 orang dengan menggunakan metode *random sampling*. Adapun perolehan datanya berasal dari data primer yang diperoleh dari wawancara, angket dan observasi. Sementara data sekunder yang diperoleh dari bahan bacaan, buku- buku serta dokumentasi dan brosur- brosur yang di peroleh dari Dinas Kesehatan Kota Dumai. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif deskriptif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan kredit konsumtif oleh PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Dumai dan bagaimana dampak perekonomian pegawai setelah melakukan pinjaman kredit serta bagaiman tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas penggunaan kredit konsumtif.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, mengenai efektifitas penggunaan kredit konsumtif oleh PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat dikatakan **“kurang efektif”**. Dampak perekonomian pegawai setelah melakukan pinjaman kredit pada PT. Bank Riau Cabang Dumai PNS merasa terbantu sekaligus merasa terbebani dengan angsuran bulanan beserta tingkat suku bunga yang cukup tinggi.

Sedangkan hukum pembiayaan kredit konsumtif Pada PT. Bank Riau cabang Dumai adalah **tidak dibolehkan** karena menggunakan balas jasa dengan

sistem bunga. Penggunaannya juga tidak sesuai dengan syariat hukum Islam karena ada unsur penyalahgunaan dana yang diberikan. Penyalahgunaan dana tersebut dinamakan khianat dan orang yang melakukannya disebut pengkhianat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

PERSEMBAHAN

NOTA PEMBIMBING

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Permasalahan
 - 1. Batasan Masalah
 - 2. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
 - 1. Lokasi Penelitian
 - 2. Subjek dan objek Penelitian
 - 3. Populasi dan Sampel
 - 4. Sumber data
 - 5. Metode Pengumpulan Data
 - 6. Analisis Data
- E. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

- A. Visi dan Misi
- B. Struktur Organisasi
- C. Keadaan Pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai

BABA III TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS
PENGUNAAN KREDIT KONSUMTIF

- A. Kredit
- B. Fungsi Kredit
- C. Kebijakan Dan Prosedur Umum Penyaluran Kredit

- D. Efektivitas
- E. Penggunaan
- F. Kredit Dalam Islam

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

- A. Tata Cara Mendapatkan Kredit
- B. Efektifitas Penggunaan Kredit Konsumtif
- C. Dampak Perekonomian PNS Dinas Kesehatan
- D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Efektivitas Penggunaan Kredit Konsumtif

BAB V KESIMPULAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini manusia dihadapkan pada perkembangan dunia yang semakin cepat, teknologi yang semakin canggih atau disebut juga dengan era globalisasi. Pada era globalisasi ini perusahaan-perusahaan khususnya industri perbankan harus mampu mempertahankan dan memenangkan persaingan dalam industri yang digeluti. Perbankan merupakan lembaga keuangan sebagai penyedia produk dan jasa untuk melayani transaksi-transaksi keuangan nasabahnya.

Salah satu fungsi perbankan adalah sebagai lembaga intermedieri yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) dan atau lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak¹.

Untuk dapat memenangkan persaingan, perusahaan harus mampu memberikan produk dengan mutu yang lebih baik, harga lebih murah, penyerahan produk lebih cepat dan pelayanan yang lebih berkualitas dibanding para pesaingnya.

Dalam kondisi yang semakin ketat, satu-satunya diferensiasi yang sangat penting dan harus dimiliki oleh suatu bank adalah unggul dalam

¹ Hermansyah dkk., *Hukum Dagang dan Perbankan (Suatu Pengantar)*, (Pekanbaru: Almaniora La- Qastu, 2005), Cet. Ke-1, h. 8

pemberian layanan terhadap nasabah². Layanan adalah tindakan atau bantuan yang diberikan oleh petugas bank kepada nasabah sehubungan dengan produk dan jasa bank. Sedangkan menurut Budiono³. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.

Untuk dapat terciptanya kepuasan dan keberhasilan apabila dana yang diberikan oleh bank penggunaanya dilakukan secara efektif. Secara etimologi efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam bahasa Inggris “effective” yang telah mengitervensi kedalam bahasa Indonesia dan memiliki makna “berhasil” dalam bahasa Belanda “effectief” memiliki makna “berhasil guna”(salma, 1986:31)⁴.

Menurut SP. Siagian Efektif adalah tercapainya berbagai sasaran yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan tertentu⁵.

Sedangkan menurut Handoko Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk menentukan tujuan yang telah ditentukan⁶.

² Dikutip dari, *Buku Panduan Standar Layana Bank Riau*, h. 2

³ Budiono, *Pelayanan Prima Perpajakan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 60

⁴ <http://net/ebook/more.php?id>

⁵ T. Hani Handoko, *Organisasi Perusahaan, Teori, Struktur, dan Prilaku*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), Cet. Ke-1 h. 50

⁶ SP. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), Cet. Ke- 2, h. 151

Oleh sebab itu efektivitas sangat mempengaruhi pencapaian yang diinginkan oleh suatu perusahaan (Bank) dalam menyalurkan produknya untuk memenuhi kepuasan nasabah. Dan ini tidak terlepas dari suatu perencanaan dan tujuan yang diinginkan oleh pihak manajemen perbankan itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan nasabah, sehingga dapat tercapainya kepuasan yang diinginkan oleh nasabah.

Dilihat dari fungsi kredit itu sendiri dewasa ini pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemua itu pada akhirnya ditunjukkan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat banyak.

Adapun manfaat kredit bagi debitur salah satunya adalah dapat meningkatkan usahanya karena debitur dapat menggunakan dana kredit untuk peningkatan dan pengadaan berbagai factor produksi, baik berupa tambahan modal kerja (*money*), mesin (*machine*), bahan baku (*material*), maupu peningkatan kemampuan sumber daya manusia (*men*), metode (*method*) perluasan pasar (*market*), sumber daya alam dan teknologi ⁷.

Dari fungsi dan manfaat kredit diatas dapat dilihat bagaimana penggunaan kredit yang telah diberikan oleh bank sesuai atau tidaknya dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan. Efektivitas penggunaan bertujuan untuk menilai atau mengukur sejauh mana kebijaksanaan yang telah ditempuh dan apakah telah memperhatikan azas-

⁷ Rahmat Firdaus, *Menejemen Perkreditan Umum (Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya)*, (Bandung: Alfabeta, 2003), Cet. Ke-1, h. 6

azas pembelanjaan yang sehat. Dengan kata lain apakah kredit yang telah diberikan oleh bank digunakan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan atau tidak.

Penggunaan berasal dari kata “guna” yang artinya “faedah atau manfaat”, “pengguna” adalah orang yang menggunakan sedangkan “penggunaan” adalah proses, perbuatan, atau cara mempergunakan sesuatu⁸.

Analisa penggunaan dana dapat dilakukan oleh bank dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dana yang diperoleh digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjakan, sehingga dapat berdampak baik bagi kehidupan ekonomi keluarganya. Laporan sumber penggunaan dana oleh PNS sangat penting artinya bagi bank untuk kelanjutan pemberian kredit untuk masa yang akan datang dalam rangka membantu mensejahterakan masyarakat banyak.

Fungsi dan peranan perbankan penting dalam memacu perkembangan perekonomian, karena jasa bank berhubungan erat dengan semua kegiatan ekonomi, industri, perdagangan dan jasa lainnya. Ekonomi adalah system aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Sedangkan perekonomian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi.

Ada beberapa unsur definisi pokok yang berkaitan dengan kredit. Kredit yang disalurkan sistem perbankan dapat dikelompokkan atau diklasifikasi

⁸Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: Penerbit Balai Pustaka) edisi Ke 2, h. 328

berdasarkan kriteria, yaitu jangka waktu, ada tidaknya jaminan, segmen usaha, tujuan, penggunaan dan kredit non kas.

Dari klasifikasi berdasarkan tujuannya, kredit dapat dikelompokkan menjadi kredit komersial (*commercial loan*), kredit konsumsi (*consumer loan*), dan kredit produktif. Kredit konsumtif (*consumer loan*) adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi debitur yang ingin membeli barang atau kebutuhan-kebutuhan konsumtif⁹. Umumnya yang melakukan pinjaman untuk keperluan konsumtif adalah unit rumah tangga.

Dalam menjalankan aktifitasnya Bank Riau telah melakukan usaha perbankan sejajar dengan lembaga perbankan lainnya di Propinsi Riau. Usaha tersebut antara lain melakukan pengumpulan dana masyarakat berupa giro, Tabungan dan deposito serta menyalurkan kembali kepada masyarakat berupa kredit atau pinjaman. Dalam pemberian kredit ini tentunya bank mempunyai prosedur sendiri yang harus dilalui oleh calon debitur.

Pemberian kredit konsumtif oleh Bank Riau merupakan upaya untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian keluarga agar bisa meningkatkan kesejahteraan baik dalam bidang pendidikan, tempat tinggal, dan kesehatan serta peningkatan sumber daya manusia untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Para PNS tidak akan berat mengembalikan kredit yang diberikan karena sistem yang digunakan dengan cara pemotongan gaji setiap bulanya.

⁹ Rahmat Firdaus, *loc. cit*

Yang dimaksud PNS disini adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri , atau diserahi tugas negara lainnya , dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁰.

Dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT. Bank Riau Cabang Dumai (Bagian KAG dan Bagian pemasaran) dari tahun ketahun permintaan kredit konsumtif mengalami peningkatan khususnya oleh PNS. Dugaan sementara oleh pihak perbankan karena kebutuhan para PNS terus bertambah, dan adanya keinginan kelayakan hidup yang lebih baik. Karena pinjaman yang dilakukan banyak yang digunakan untuk pembiayaan renovasi rumah dan biaya pendidikan¹¹.

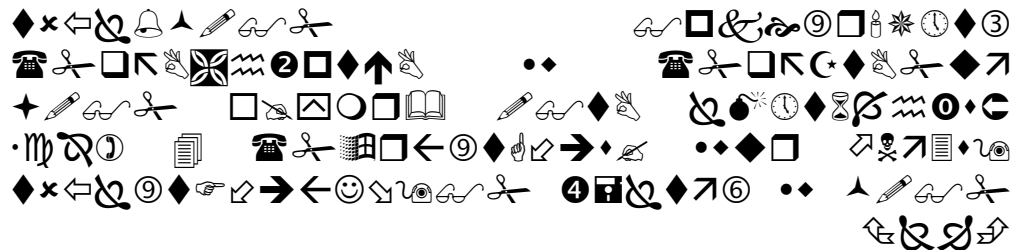
Pembiayaan konsumtif ini diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan, papan, maupun jasa seperti pendidikan dan pengobatan, semuanya adalah kebutuhan yang telah menjadi potensi kehidupan yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia.

Islam tidak melarang seorang muslim terhadap kelayakan hidup, sebagaimana itu dilarang oleh sebagian agama dan filsafat. Akan tetapi islam melarang kita untuk “ tidak mau menikmati” atau “berlebihan dalam

¹⁰Tunggal Hadi Setia, *Pokok-Pokok Kepegawaian Berserta Peraturan Pelaksananya*, (Jakarta: Harvarindo 2006), h. 3

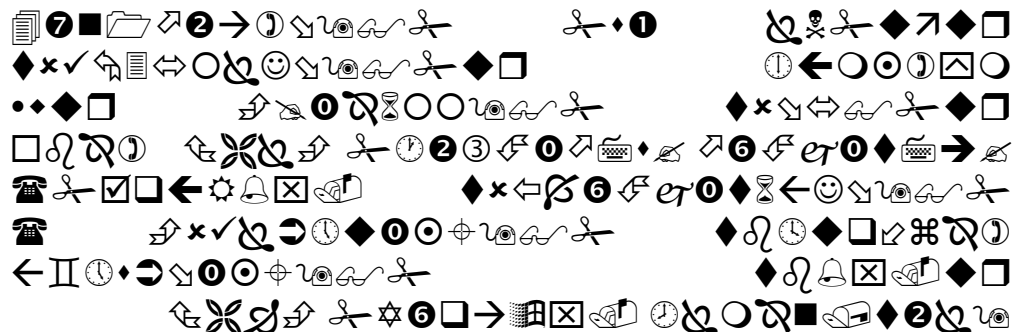
¹¹ Ena Karmilla, (Bag. KAG), wawancara, 20 Februari 2009

menikmati” itu semua. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al Maidah ayat: 87



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Islam menganggap bahwa kebutuhan fisik sebagai kebutuhan asasi mutlak yang harus dipenuhi dengan berbagai mekanisme baik sebagai tanggung jawab individu, keluarga, masyarakat, dan Negara¹². Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan fisik merupakan pemenuhan yang wajib dilakukan agar manusia tidak mengalami kerusakan organ tubuh, penyakit dan kematian. Karnanya, masing-masing individu berkewajiban mengerahkan segenap potensi dan kemampuannya untuk hal ini. Setiap individu wajib berkerja untuk mendapatkan nafkah bagi dirinya dan tanggungannya. Firman Allah dalam Q.S Al Isra' ayat 26-27:



¹² Muhammad Sholehuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke- 1, h. 22

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Masyarakat wajib membantu, tetangga, kerabat, atau anggota masyarakat lainya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan asasinya sendiri. Sedangkan Negara bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan asasi warga negaranya.

Kebutuhan mendasar yang wajib di penuhi dalam persepektif Islam adalah:

a) Pangan dan Sandang

Pangan dan sandang adalah kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi, tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari kebutuhan itu. Oleh karena itu, islam menjadikan dua hal itu sebagai nafkah pokok yang harus diberikan kepada orang-orang yang berjanggung jawab.

b) Papan

Demikian halnya dengan papan atau perumahan ia termasuk kedalam kategori kebutuhan pokok, sebagaimana pangan dan sandang yang wajib dipenuhi oleh Negara.

c) Kesehatan dan Pendidikan

Kesehatan dan pendidikan adalah dua hal yang merupakan kebutuhan asasi dan harus dirasakan oleh manusia dalam hidupnya. Keduanya termasuk masalah-masalah pelayanan umum (ri`ayatu asy syu-

uun) dan kemaslahatan yang terpenting. Dalam hal ini, negaralah yang berkewajiban mewujudkan pemenuhan bagi seluruh rakyat.

Demikianlah islam memandang betapa pentingnya pemenuhan kebutuhan untuk menjamin kesejahteraan umatnya. Dan islam juga memandang ini bukan hanya tugas individu tapi juga tugas pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, dan ini dilakukan pemerintah dengan melakukan kerja sama dengan pihak lembaga keuangan bank yaitu dengan memberikan jaminan kesejahteraan bagi para pegawai khususnya dalam bentuk pemberian kredit konsumtif.

Pada umumnya bank membatasi pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah dan kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan utama (*main collateral*), adapun untuk pemenuhan kebutuhan jasa bank meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai collateral. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari sumber pendapatan lain dan bukan dari eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini¹³.

Karena pinjaman konsumtif tidak bersifat produktif, dan adanya pengaruh pada produktifitas masyarakat secara langsung, yaitu mendorong produksi dan suplai. Karena pinjaman ini tidak menghasilkan suatu pendapatan langsung maka bank tidak mungkin meminjamkan uang keperluan demikian atas dasar mitra usaha. Maka dari itu di anjurkan agar

¹³Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), Cet. Ke-1, h. 168

pinjaman demikian dilakukan oleh perkumpulan koperatif rakyat atau suatu badan kredit pemerintah. Dan pinjaman ini harus ada tanggungan berupa deposito atau bukti harta tetap yang dimiliki peminjam.

Adapun bentuk akad atau kontrak kerja sama antara bank dengan pihak instansi adalah dalam bentuk tertulis yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan diantara kedua belah pihak. Yaitu bank memfasilitasi kredit konsumtif baik instansi negeri maupun swasta ini dilakukan oleh pihak bank dengan bedahara instansi terkait yang berurusan tentang pemotongan gaji dengan persetujuan dari pimpinan dari kedua belah pihak.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang penulis lakukan efektivitas penggunaan kredit konsumtif oleh PNS masih belum sepenuhnya efektif, yang mana PNS menggunakan dana kredit konsumtif tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan diawal perjanjian. Maka dari itu terdapat kesenjangan- kesenjangan penyalahgunaan penggunaan kredit konsumtif.

Adanya kesenjangan- kesenjangan yang ditemukan dalam efektivitas penggunaan dana kredit konsumtif oleh nasabah dapat dilihat dari gejala-gejala dibawah ini:

1. Masih adanya ketidak jujuran PNS dalam mengajukan dan menggunakan dana kredit konsumtif yang telah dicairkan
2. Dalam penggunaan dana kredit konsumtif masih ada PNS yang menggunakan untuk keperluan usaha bukan untuk keperluan konsumtifnya.

3. Seringnya melakukan pembiayaan kredit konsumtif untuk keperluan yang tidak mendesak (tidak bersifat konsumtif)

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul: **EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KREDIT KONSUMTIF OLEH PNS DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

B. Permasalahan

1. Batasan Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis perlu menetapkan batasan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai efektivitas penggunaan kredit konsumtif oleh PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Dumai.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana cara memperoleh kredit konsumtif pada PT. Bank Riau Cabang Dumai
- b. Bagaimana efektivitas penggunaan kredit konsumtif oleh PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Dumai.
- c. Bagaimana dampak perekonomian PNS setelah melakukan pinjaman atau pembiayaan.
- d. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas penggunaan kredit konsumtif

C. Tujuan dan Mafaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui cara memperoleh kredit Konsumtif pada PT. Bank Riau Cabang Dumai.
- b. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan kredit konsumtif oleh PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Dumai.
- c. Untuk mengetahui dampak perekonomian PNS setelah melekukan pinjaman atau pembiayaan.
- d. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas penggunaan kredit konsumtif oleh PNS Dinas Kesehatan kota Dumai.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk dapat menambah wawasan tentang efektivitas penggunaan kredit konsumtif oleh PNS dilingkungan Dinas kesehatan Kota Dumai.
- b. Bagi Dinas kesehatan Kota Dumai dapat mengambil kebijakan di masa yang akan datang setelah dilakukannya penelitian ini.
- c. Bagi Bank Riau Cabang Dumai dapat mengambil kebijakan bahwasanya pemberian kredit konsumtif pun perlu pengawasan dalam penggunaanya

- d. Sebagai bahan rujukan dalam menambah khazanah perpustakaan UIN Suska Riau

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Dumai yang berlokasi pada Jl. Pattimura No. 5 kecamatan Dumai Barat.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Dumai.
- b. Objek penelitian ini adalah efektivitas penggunaan kredit konsumtif oleh PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kota a Dumai.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Madya Dumai sebanyak 60 orang.

Dari populasi tersebut diambil dan ditetapkan sebagai sample dengan menggunakan metode random sampling, yaitu pengambilan sample yang dilakukan secara acak atau di undi. Sample diambil sebanyak 50 orang. Yang melakukan pembiayaan pada PT. Bank Riau Cabang Dumai.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari Dinas Kesehatan Kota Dumai dan PT. Bank Riau Cabang Dumai.

b. Data Sekunder

Data skunder yang diperoleh dari riset perpustakaan (*Library Research*) dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan peneleitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari lapangan yang valid dan akurat dari subjek penelitian, penulis menggunakan instrument:

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Ada pun yang penulis wawancarai antara lain: Kepala Dinas Kesehatan, Bagian Keuangan (Bendahara), Bagian Kepegawaian, Pinsi Operasional (PT.Bank Riau Dumai), Bagian KAG (pencairan), Custemer Service (CS), dan lain- lain.

b. Angket

Penulis membuat daftar pertanyaan secara tertulis (angket) dengan memberi alternative jawaban untuk setiap item pertanyaan,

kemudian disebarkan kepada responden yang menjadi subjek penelitian yang diteliti.

c. Observasi

Penulis melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian. Bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara langsung, sehingga penulis dapat mengamati segala aspek yang terjadi dilapangan.

6. Analisis Data

Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif Deskriptif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data dengan data lainya dihubungkan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti. Metode penulisan menggunakan Metode Deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh. Kemudian dianalisis sesuai dengan masalah tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, jumlah bab yang akan di gunakan adalah sebanyak lima bab diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari pendahuluan, latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum Dinas Kesehatan Kota Dumai, visi dan misi, struktur organisasi.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KREDIT KONSUMTIF

Dalam bab ini akan dijelaskan yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang meliputi: Kredit dan kredit konsumtif, prosedur penyaluran kredit konsumtif, efektivitas penggunaan kredit, kredit dalam Islam.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas penggunaan kredit konsumtif oleh PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Dumai menurut persepektif hukum Islam.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis sebagai jalan keluar dari permasalahan yang di hadapi.

BAB II

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Dinas Kesehatan Kota Dumai

Untuk melaksanakan program-program kerja yang telah disusun serta menunjang pencapaian tujuan sebagai yang diharapkan, maka kehadiran suatu organisasi atau instansi mutlak di perlukan.

Demikian pula dengan Program Pembangunan kota Dumai yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang kesehatan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bebas dari penyakit, Kota Dumai haruslah memiliki instansi atau lembaga yang mewadahi kegiatan pengelolaan bidang kesehatan secara khusus.

Instansi yang dimaksud adalah Dinas Kesehatan Kota Dumai yang di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 717 tanggal 22 Mei 1999 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai¹.

Sejalan dengan keberadaan Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagaimana lembaga-lembaga pemerintahan daerah lainnya,Dinas Kesehatan memiliki tugas sebagaimana sesuai dengan namanya yaitu melayani masyarakat dalam bidang kesehata dan kesejahteraan masyarakat. Khususnya msyarakat Kota Dumai.

¹ Dokumentasi Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2000

Dinas Kota Dumai awal berdirinya sampai sekarang terletak dikecamatan Dumai barat yang berlokasi di jalan pattimura. Keberadaan Dinas Kesehatan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mendukung perkembangan dan kelanjutan kehidupan manusia yang bebas dari penyakit.

Baru-baru ini dinas kesehatan Kota Dumai telah berhasil membuat buku profil kesehatan KotaDumai tahun 2000,Dengan diterbitkannya buku profil kesehatan Kota Dumai tahun 2000 bertujuan untuk menyediakan data informasi yang akurat, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan dalam rangka meningkatkan kemampuan manajemen kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna².

B. Visi dan Misi

1. Visi

Sebagaimana lembaga- lembaga pemerintahan lainnya Dinas Kesehatan Memiliki peranan yang sangat penting dan memiliki tugas yang sangat berat sesuai namanya yaitu melayani masyarakat dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kota Dumai.

Dinas Kesehatan Kota Dumai memiliki Visi untuk pembangunan kesehatan masyarakat kota Dumai, dengan visinya yaitu “ *Masyarakat Dumai yang sehat, kreatif, dan produktif dalam lingkungan dan prilaku sehat*”.

² Profil Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2009

2. Misi

Misi pembangunan kota Dumai terdiri dari beberapa kategori yaitu sebagai berikut:

- a. memantapkan manajemen kesehatan yang dinamis dan akuntabel
- b. membudayakan pembangunan yang berwawasan kesehatan
- c. membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui upaya promotif dan preventif
- d. pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau dengan prioritas pada masyarakat ekonomi lemah dan daerah terpencil
- e. memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kemandiriannya mengatasi masalah kesehatan³

C. Struktur Organisasi

Bertitik tolak dari rangkaian tugas pokok, fungsi dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kota Dumai, maka keberhasilannya tidak terlepas dari keberadaan dan peranan dari berbagai unit kerja yang terstrukturisasi dalam sasaran keorganisasian, karna bagaimana pun kelangsungan suatu organisasi adalah berkat kerjasama satuan-satuan kerja dan bukan atas kerja pimpinan semata.

Dengan perkataan lain, untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dibidang kesehatan sekaligus menyelenggarakan kewajiban maupun amanat tanggung jawab pendeteksian penyakit yang berkembang maupun yang telah ada. Dinas Kesehatan terdiri atas beberapa departemen

³ Dikutip dari Brosur Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2009

atau unit-unit kerja yang terangkum dalam susunan organisasi sebagaimana terlampir.

Apabila dicermati dengan seksama, maka terlihat dengan jelas bahwa organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumia telah mengalami perubahan dalam struktur organisasinya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai dewasa ini sehingga dijumpai departemen-departemen yang baru.

Pentingnya struktur organisasi bagi dinas kesehatan kota dumai adalah untuk memberi garis kewenangan terhadap setiap departemen kerja atau unit kerja yang ada secara tegas, sehingga dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan uraian tugas yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya uraian tugas tersebut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah orang tertinggi yang berada pada suatu organisasi atau lembaga yang bertugas mengawasi, mengontrol dan pengambilan keputusan terakhir dalam penetapan suatu kebijakan. Selaku kepala Dinas tugas dan wewenangnya harus dijalankan penuh dengan rasa tanggung jawab.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan wewenangnya sebagai pejabat ahli mempunyai wewenang memberikan perintah menurut bidangnya sendiri.

3. Sekretariat

yang terdiri dari subbagian administrasi dan umum, program evaluasi dan pelaporan serta subbagian kepegawaian.

4. Bidang Pelayann Kesehatan

Bidang tersebut bertugas melayani dibidang pelayanan kesehatan dasar, yang menyangkut masalah kesehatan lingkungan, selain itu juga terdapat bagian bina rumah sakit dimana bertugas sebagai penyelenggara pelayanan demi terciptanya kenyamanan bagi pasien. Disamping itu juga terdapat bidang farmasi dan alat kesehatan.

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang tersebut melayani masalah jaminan kesehatan, sumber daya kesehatan (SDK) dan akreditasi serta pelayanan sarana kesehatan.

6. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang ini melayani masalah kesehatan keluarga juga bertugas sebagai media promosi kesehatan serta melayani masalah gizi dan peran serta masyarakat untuk terciptanya kehidupan yang bebas penyakit.

7. Bidang P2PL

Tugas dan wewenangny adalah menangani masalah pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, serta surveilans dan kesehatan matra.

D. Keadaan Pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai

Komponen pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai teridentifikasi melalui jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, pangkat atau golongan serta masa kerja pegawai dan tingkat penghasilan per bulan.

1. Jenis Kelamin

Tabel D.1
Distribusi jenis kelamin pegawai pada
Dinas Kesehatan Kota Dumai

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Pria	15	25
2	Wanita	45	75
	Jumlah	60	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2009

Dari tabel A.1 Dapat dijelaskan bahwa dari 60 pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai yang berjenis kelamin pria sebanyak 15 orang atau 25%, Sedangkan yang berjenis kelamin wanita berjumlah 45 orang atau 75% dari keseluruhan jumlah pegawai.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir dan cara berkerja seseorang. Dimana orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi biasanya mereka memiliki pola pikir yang cukup cerdas dan berkerja lebih baik. Ini disebabkan karena orang tersebut memiliki dasar yaitu ilmu pengetahuan yang mereka peroleh selama mengikuti pendidikan. Dan juga memiliki pola pikir yang lebih maju dalam menghadapi suatu masalah karena sudah terbiasa menggunakan pemikiran dalam menghadapi setiap masalah yang dihadapi sewaktu

mengikuti pendidikan. Sangat jauh berbeda dengan orang yang pendidikannya lebih rendah, dia lebih cenderung melaksanakan suatu pekerjaan dengan sikap yang emosi dan kurang menggunakan rasionalitasnya.

Mengenai tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel D. 2
Distribusi Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas
Kesehatan Kota Dumai

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA	3	5
2	D2	7	12
3	D3	25	41
4	D4	10	17
5	S1	15	25
	Jumlah	60	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2009

Dari tabel A. 2 diatas dapat kita lihat bahwa pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai, yang terbanyak memiliki pendidikan Diploma (D3) yakni sekitar 25 orang atau 41%. Dan yang paling sedikit adalah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 3 orang atau 5%. Namun demikian ada pegawai yang berpendidikan D2 dan D4 yang masing-masing 7 orang atau 12%, dan 10 orang atau 17%.

3. Pangkat dan Golongan

Pangkat dan golongan sangat mempengaruhi jabatan yang disandanginya, dan juga mempengaruhi terhadap pemberian kredit. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel D. 3
Distribusi jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai Berdasarkan
Pangkat /Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Golongan IV	6	10
2	Pegawai Golongan III	42	70
3	Pegawai Golongan II	12	20
4	Pegawai Golongan I	-	-
	Jumlah	60	100

Sumber: Dinas Kesehatan kota Dumai Tahun 2009

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa golongan yang paling tinggi dimiliki oleh Pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah golongan III yakni sebanyak 42 atau 70%, terdiri dari golongan IIIa, IIIb, IIIc, IIId, dan IIa, IId. Sedangkan pangkat atau golongan yang paling rendah adalah golongan I yaitu sebanyak 0% atau tidak ada sama sekali.

4. Masa Kerja

Masa kerja merupakan lamanya pegawai tersebut menggeluti atau melaksanakan pekerjaan tersebut. Masa tersebut juga dapat mempengaruhi pola pikirdan sikap pegawai terhadap suatu pekerjaan dimana orang yang sudah lama berkerja biasanya akan berkerja lebih baik karena ia telah memiliki pengetahuan dan juga pengalaman dibidang pekerjaan tersebut.

Semakin lama orang tersebut berkerja maka ia memiliki pengetahuan yang semakin baik karena telah terbiasa dalam menghadapi masalah dan tahu bagaimana mengatasi masalah tersebut, jika dibandingkan dengan pegawai baru yang harus banyak belajar dari pegawai yang memiliki masa kerja yang cukup lama.

Untuk lebih jelasnya mengenai masa kerja pegawai yang ada pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel D. 4
Distribusi Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai Berdasarkan Masa Kerja.

No	Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1	1- 5 Tahun	28	47
2	6- 10 Tahun	30	50
3	11- 15 Tahun	2	3
4	16- 20 Tahun	-	-
	Jumlah	60	100

Sumber: Dari Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2009

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pegawai yang memiliki masa kerja antara 1- 5 tahun sebanyak 28 orang atau sekitar 47%, dan pegawai yang memiliki masa kerja 6- 10 tahun sebanyak 30 orang atau 50%, sementara pegawai yang memiliki masa kerja 11- 15 tahun sebanyak 2 orang atau 3%, dan yang masa kerja pegawai 16- 20 sebanyak 0(nol) atau tidak ada.

Berdasarkan keterangan diatas dapat kita lihat bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki masa kerja yang cukup lama, dan diharapkan dengan lamanya pegawai tersebut berkerja dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa puas terhadap layanan yang diberikan.

Dan kepada pegawai yang masih memiliki masa kerja yang masih relatif rendah diharapkan dapat belajar dari pegawai yang masa kerjanya lebih lama (senior), baik dari segi penanganan terhadap suatu masalah maupun terhadap peningkatan keahlian. Apabila diantara anggota

organisasi telah tercipta suatu suasana kerja yang harmonis diantara pegawai maka setiap permasalahan yang timbul dapat dihadapi dengan baik, karena telah tercipta suatu tim kerja yang solid.

5. Kelompok Umur

Semakin bertambah usia seseorang maka jiwa kedewasaan akan terpatrit dalam sikap dan tingkah lakunya yang selanjutnya akan mempengaruhi etos kerjanya. Kelompok umur pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel D.5
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	41- 50 tahun	20	33
2	31- 40 tahun	25	42
4	21- 30 tahun	15	25
	Jumlah	60	100

Sumber: Dari Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2009

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa pegawai yang berada pada usia 31- 40 tahun memiliki jumlah cukup besar yaitu sebanyak 25 orang atau sebesar 45%, untuk pegawai memiliki usia 41- 50 sebanyak atau sekitar 33%, sedangkan pegawai yang berusia antara 21- 30 tahun berjumlah 15 Orang atau sekitar 25% dari keseluruhan jumlah pegawai.

Dengan banyaknya jumlah pegawai yang memiliki usia 31- 40 yang termasuk pada usia produktif, diharapkan pegawai tersebut dapat berkerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena kalau dilihat dari segi usia

pegawai tersebut telah cukup berpengalaman dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Dan juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi pegawai yang memiliki usia yang lebih muda dari pegawai tersebut. Dengan demikian diharapkan akan terciptanya suasana kerja yang harmonis dan diharapkan akan dapat menunjang peningkatan pelaksanaan setiap aktivitas yang ada terhadap Ka. Dinas Kesehatan Kota Dumai terhadap pegawainya.

6. Jumlah Penghasilan

Tabel D. 6
Distribusi Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai
Berdasarkan Tingkat Penghasilan/ Bulan

No	Tingkat Penghasilan	Jumlah	Persentase
1	2.500.000-2.300.000	6	10
2	2.200.000-2.000.000	24	40
3	1.900.000.-1.700.000	20	33
4	1.500.000-1.100.000	10	17
	Jumlah	60	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2009

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa pegawai yang memiliki tingkat penghasilan 2.500.000- 2.300.0000 sebanyak 6 orang atau 10%. Dan pegawai yang penghasilannya 2.200.000- 2.000.000 adalah sebanyak 24 orang atau 40% sedangkan pegawai yang penghasilanya 1.900.000-1.700.000 sebanyak 20 orang atau 33%. Dan yang tergolong penghasilan 1.100.000-1.100.000 sebanyak 10 orang atau 17%.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KREDIT KONSUMTIF

A. Kredit

Perkataan kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti kepercayaan, atau “*credo*” yang berarti saya percaya. Jadi seandainya seseorang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan (*trust*). Dengan perkataan lain maka kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Pengertian kredit menurut beberapa ahli:

“Credit is the personal reputation a person has, in consequence of which he can buy money or goods or labor, by giving in exchange for them, a promise to pay at a future time” (Mac Leod).

(Kredit adalah suatu reportasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang, atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang).

“The transfer of something valuable to another, whether money, goods or services in the confidence that he will be both willing and able, at a future day, to pay is equivalent” (Tucker)

(pertukaran atau pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang lainnya baik itu berupa uang, barang maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama di masa yang akan datang¹.

“In a general sense credit is based on confidence in the debtors ability to make a money payment at some future time” (Rollin G. Thomas).

(dalam pengertian umum kredit didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang)².

“kredit: system keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan dengan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam” (ensiklopedia Umum).

Menurut Undang-Undang No. 10/1998 (pasal 21 ayat 11): kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10/1998; Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

¹ Rahmat Firdaus, *op. cit.*, h. 2.

² *ibid.*

Walaupun banyak definisi-definisi yang ditulis antarlain sebagaimana diatas, namun sebagai landasan pembahasan selanjutnya, akan berpegang kepada definisi yang terakhir, yaitu menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang- undang No. 7/1992 Tentang Perbankan.

Mengingat di Negara kita sistem perbankan yang berlaku dewasa ini ada dua macam (dual system) yaitu konvensional (yang masih menerapkan sistem bunga), dan bank syariah (yang menitik beratkan pada bagi hasil), sebagai padanan kredit (pada bank konvensional), maka pada bank syariah dikenal dengan adanya aktivitas pembiayaan.

Pengertian pembiayaan (pada bank syariah), menurut Undang-Undang No. 10/1998: pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil

Prinsip syariah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarokah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murobahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Kredit dilihat dari segi tujuan kredit, kredit terbagi menjadi dua yaitu kredit produktif dan kredit konsumtif. Dalam hal ini akan hanya di jelaskan mengenai jenis konsumtif.

Secara definitif kredit konsumtif adalah dengan kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha ³. Keredit adalah masalah yang hidup dalam masyarakat. Pergaulan dengan sesama manusia dalam rumah tangga dengan rukun tetangga atau warga,membutuhkan norma etik yang harus dan dihormati oleh masing-masing individu masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat lingkungan yang terbatas, pinjam-meminjam alat kebutuhan sehari- hari seperti perabot rumah tangga, barang pecah belah sudah menjadi kebiasaan yang menandakan hidupnya unsur percaya mempercayai.

Kredit konsumtif adalah kredit yang dipakai secara langsung meninggalkan bekas, untuk menutupi kekurangan rumah tangga, untuk membayar hutang, untuk mengadakan pesta (peralatan) perkawinan⁴.

Selanjutnya kredit dalam arti yang sesungguhnya adalah kepercayaan istilah kredit telah dikenal dan jauh melanda kehidupan ekonomi rumah tangga, baik

³ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), edisi ke-3 h. 244.

⁴ Muljanto Sumardi, *Sumber Pendapatan, Kebutuhan Pokok dan Prilaku Menyimpang*, (Jakarta: Cv Raja Wali, 1982), h. 70

dikota maupun dipedalaman. Dalam hal ini, kredit diartikan sebagai pinjaman uang.

Sedangkan menurut mandala kredit konsumtif (consumer loan) kredit yang sebaiknya untuk memenuhi kebutuhan dana bagi debitur yang ingin membeli barang atau kebutuhan- kebutuhan konsumtif⁵. Umumnya yang melakukan pinjaman konsumtif adalah unit rumah tangga. Contoh kredit konsumtif adalah kredit rumah (kredit kepemilikan rumah) dan kredit pembelian mobil yang digunakan untuk keperluan sendiri. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

Yang pertama-tama menentukan besarnya permintaan suatu barang konsumtif ialah pendapatan. Pendapatan merupakan sumber untuk pengeluaran, sebagian dari pendapatan tidak dikeluarkan untuk membeli barang- barang, artinya bagian itu ditabung. Tabungan ini mempunyai efek negative atau menahan terhadap permintaan konsumtif.

Dari segi social ekonomi kredit diberikan untuk golongan tertentu dalam masyarakat karena kedudukan sosialnya seperti misalnya pegawai atau karyawan yang hidup dari penghasilan yang nyata. Maka dapat diandalkan sebagai jaminan.

Kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan konsumtif yang diperlukan pemohon dan sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari penghasilan atau gaji pemohon. Pada umumnya kredit konsumtif bunganya tinggi. Karena resiko yang dihadapi oleh bank juga tinggi. Tingginya resiko yang

⁵ Mandala Manurung, dkk, *uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, (Jakarta: FEUI, 2004), h. 188

dihadapi oleh bank tersebut tergambar pada peroses pemberian kredit tersebut. Yaitu cepat dan mudah cairnya. Kredit konsumtif ini sebenarnya memberatkan bagi nasabahnya, namun demikian karena kebutuhan yang mendesak calon nasabah tidak melihat besarnya bunga, akan tetapi kecepatan dana tersebut diterima nasabah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh nasabah⁶.

B. Fungsi Kredit

Dewasa ini pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemua itu pada akhirnya ditunjukkan untuk menaikkan taraf rakyat banyak.

Kalo dijabarkan lebih rinci, maka fungsi-fungsi kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.
- b. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*.
- c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.
- d. Kredit sebagai alat pengendalian harga
- e. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/faedah/kegunaan potensi-potesi ekonomi yang ada⁷.

C. Kebijakan Dan Prosedur Umum Penyaluran Kredit

Kebijakan dan prosedur pemberian kredit merupakan pertahanan kedua (*the second line of devince*) dalam pemberian kredit. Kebijakan kredit memuat berbagai

⁶ Suhardjono, *Management Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Jakarta: UMP AMP YKPN, 2003) h. 25

⁷ Rahmat Firdaus *op. cit.*, h. 5

ketentuan yang digunakan sebagai panduan para pejabat kredit, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya selalu mematuhi filosofi umum pemberian kredit.

Sedangkan prosedur kredit merupakan gabungan antara system operasional dan pengawasan kredit yang bertujuan untuk menjamin bahwa semua penyimpangan atau pengecualian terhadap kebijakan- kebijakan. Umumnya perkreditan telah mendapat perhatian dari manajemen. Prosedur ini meliputi prosedur persetujuan pemberian kredit, review, pinjaman dan sebagainya⁸.

Prosedur umum pemberian kredit, sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikeluarkan, tahap-tahap dalam memberikan kredit ini kita kenal dengan nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak.

Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian ada kekurangan, maka pihak Bank dapat meminta kembali kepada nasabah atau bahkan ditolak. Dalam peraturannya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah konsumtif atau produktif.

⁸ Rahmat Firdaus, *Menejemen Perkreditan Umum (Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya)*, (Bandung: Alfabeta, 2003), Cet. Ke-1, h. 7

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut⁹ :

1. Pengajuan Proposal

Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan dalam setiap proposal suatu kredit hendaknya yang berisi :

- a. Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengawas berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produuknya.
- b. Tujuan pengambilan kredit dalam hal-hal harus jelas, apakah memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
- c. Besarnya kredit jangka waktu
- d. Cara pemohon mengembalikan maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembangkan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.
- e. Jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:

- a. Akte pendirian Perusahaan
- b. Bukti diri atau KTP para pengurus dan pemohon kredit
- c. T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan)
- d. Neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir

⁹ Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-2 h. 110

- e. NPWP (Nomor Pengusaha Wajib Pajak)
- f. Photo copy sertifikat yang dijadikan jaminan
- g. Daftar penghasilan bagi perseorangan
- h. Kartu Keluarga (KK) bagi perseorangan
- i. Daftar Objek pembiayaan¹⁰

Filosofi umum pemberian kredit

- a. Perisip kepercayaan
- b. Prisip perjanjian
- c. Prinsip kesopanan

D. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut SP. Siagian, Efektif adalah tercapainya berbagai sasaran yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan tertentu.

Sedangkan Menurut Ricard M. Steers, Efektivitas mudah dimengerti bila dipandang sebagai kemampuan organisasi, mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya yang ada atau tersedianya untuk mencapai tujuannya¹¹.

Dari pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa efektivitas dalam organisasi adalah tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran dari tujuannya.

¹⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), Cet. Ke-1, h. 140

¹¹ Richard M. Strees, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Air Langga, 1980), h. 159

Handoko menjelaskan Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk menentukan tujuan yang telah ditentukan¹².

Selanjutnya Efektivitas menurut Komaruddin, adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu¹³. Efektivitas berdasarkan pengertian Komaruddin ini menitik beratkan kepada analisa tentang keadaan yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

M. AS'ad, menjelaskan setiap pekerjaan dapat dikatakan efektif ditentukan oleh pencapaian sasaran yang ditetapkan dan dengan menggunakan waktu yang dicapai.

Dalam buku lainnya Richard M. Streers mengatakan bahwa efektivitas adalah suatu taraf yang menunjukkan tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha tersebut mencapai tujuannya, secara ideal taraf efektivitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dan optimal.

Dilihat dari pelaksanaan cara-cara atau metode dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas sangat tergantung pada organisasi, individu, pelaksana masing-masing. Ukuran yang mendasar digunakan dalam melihat efektif atau tidaknya suatu pekerjaan atau kegiatan akan sangat tergantung pada orang-orang

¹² T. Hani Handoko, *op. cit.*, h.50

¹³ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bina Aksara, 1994), Cet. Ke-1, Edisi 2, h. 269

yang melaksanakan, lingkungan yang merespon dan peralatan yang mendukung kegiatan atau pekerjaan tersebut.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi tersebut dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mencapai hasil yang baik.

E. Penggunaan

Penggunaan berasal dari kata “guna” yang artinya “faedah atau manfaat” “pengguna” adalah orang yang menggunakan sedangkan “penggunaan” adalah proses, perbuatan, atau cara mempergunakan sesuatu.

1. Teori Utilitas dan Konsep Maslahat

Dalam kajian ilmu ekonomi, terdapat satu teori yang dinamakan utilitas yang berasal dari bahasa inggris *utility*. Secara sederhana, utilitas dapat diartikan sebagai kegunaan atau kemanfaatan¹⁴. Sedangkan bila ditinjau dari maknanya yang lebih luas, utilitas mengandung arti rasa kesenangan atau kepuasan yang timbul karena konsumsi.

Faham yang menganut teori ini disebut utilitarianisme. Dalam bidang filsafat, utilitarisme menggunakan manfaat (*utility*) atau kebahagiaan yang terbesar (*the greatest happiness*) sebagai dasar moralitas. Menurut teori ini, suatu tindakan dinyatakan benar jika memberikan kebahagiaan dan salah jika

¹⁴ Indri dkk, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka Publisher, 2008), Cet. Ke-1, h. 109

Jhon Struat Mill(1806-1873), mengikuti pandangan Jeremy Bentham (1748-1832), teori ini dinyatakan dengan: “*the greatest happiness of the greatest number*” (kebahgiaan terbesar bagi jumlah yang besar). Bentham menyatakan bahwa alam telah menempatkan manusia dibawah tuntutan dua faktor: kelezatan dan kesakitan¹⁵.

Teori utilitas dalam bidang ekonomi mengajarkan agar masyarakat, sebagai konsumen dalam hal mengkonsumsi suatu barang atau jasa, maupun memilih dan memilih barang atau jasa yang hendak dikonsumsi, apakah membawa nilai guna (manfaat) atau sebaliknya demi mencapai tingkat kepuasan (kebahagiaan) dan menghindari timbulnya rasa penyesalan. Yang menjadi dasar teori utilitas dalam ekonomi kapitalis dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan, kebahagiaan dan menghindari kesengsaraan tidak dilarang oleh Islam. Jika kita perhatikan dalam Al-quran dalam Qs Al-Jumu'ah ayat 10 Allah Berfirman:





Artinya: “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”¹⁶

Ayat ini secara tegas memerintah umat Islam agar tidak semata-mata memperhatikan kehidupan akhirat dengan beribadah kepada Allah, tetapi berusaha dengan giat, tekun, rajin, untuk mendapatkan karunianya. Berkerja disamping untuk beribadah kepada Allah untuk mencapai kepuasan dan kebahagiaan. Islam tidak mengingkari kenyataan bahwa keinginan dan kebutuhan untuk mendapatkan kenikmatan, kelezatan, dan kebahagiaan tampaknya merupakan kodrat manusia.

Islam tidak melarang seseorang berkonsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehingga memperoleh manfaat dan kemaslahatan yang setinggi-tingginya bagi kehidupan¹⁷. Hal ini, sebagaimana telah dijelaskan, merupakan dasar dan tujuan dari syari'ah islam sendiri, yaitu *maslahat al-ibad* (kesejahteraan hakiki bagi manusia), dan sekaligus sebagai cara untuk mendapatkan *falah* (keberuntungan) yang maksimum. Dengan kebutuhan-kebutuhan manusia berserta alat-alat pemuasnya tidak hanya berkenaan dengan bidang materi tetapi juga rohani berbeda dengan teori utilitas dalam system kapitalis yang menekankan pada aspek-aspek yang bersifat materi saja.

Islam juga tidak memandang kegunaan (utilitas) secara subjektif dalam artian jika suatu barang mempunyai kegunaan, maka barang itu dapat memenuhi

¹⁶ Departemen RI, Terjemahan Alqur'an (CV. Penerbit J. Art: 2003)

¹⁷ Indri, *op. cit.*, h. 120

kebutuhan. Menurut ajaran islam, kegunaan barang bersifat objektif dalam arti meskipun suatu barang mempunyai kegunaan secara fisik tetapi jika dilarang dikonsumsi oleh syara, maka barang itu dikatakan tidak mempunyai kegunaan dan karenanya tidak layak dikonsumsi.

Agar dalam mengkonsumsi, umat Islam sejalan dengan konsep maslahat, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat atau Negara. Terselenggaranya kelangsungan hidup manusia diatur oleh Allah. Manusia tidak bisa memaksakan cara pemenuhan hidup orang lain kepada dirinya ataupun sebaliknya. Seorang muslim yakin bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan hidupnya.
- b. dalam konsep Islam, kebutuhan membentuk pola konsumsi seorang muslim, dimana batas-batas fisik merefleksikan pola yang digunakan seorang muslim untuk melakukan aktivitas konsumsi, bukan dikarenakan pengaruh preferensi semata. Keadaan ini akan menghindari pola hidup yang berlebih-lebihan, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga konsistensinya dalam jangka panjang. Sebab, pola konsumsi yang didasarkan atas kebutuhan akan menghindari pengaruh-pengaruh pola konsumsi yang tidak perlu.
- c. dalam mengkonsumsi seorang muslim harus menyadari bahwa ia menjadi bagian dari masyarakat. Maka, dalam mengkonsumsi dituntut untuk saling menghargai dan menghormati keberadaan sesamanya. Bila keadaan menjadi kesadaran

bersama, maka akan terbangun kehidupan yang berkeadilan, terhindari dari kesenjangan sosial atau diskriminasi sosial¹⁸.

Pendapat serupa dikemukakan Suhrawardi K. Lubis bahwa aspek utama yang mempengaruhi tingkah laku konsumen dalam rangka melakukan permintaan kebutuhan terhadap pasar yang membedakan konsumen yang dipengaruhi oleh semangat Islam dan yang tidak, antara lain:

- a. Permintaan pemenuhan kebutuhan terhadap pasar hanya sebatas barang yang penggunaannya tidak dilarang dalam syariat Islam. Pengaruh positif ajaran Islam terhadap pola konsumsi. Konsumen tidak akan melakukan permintaan terhadap kebutuhan barang dan jasa yang penggunaannya tidak dibolehkan oleh syariat Islam.
- b. Cara hidup tidak boros dan kebutuhan terhadap barang konsumsi diteliti terlebih dahulu. Dalam ajaran agama Islam perilaku boros merupakan perbuatan yang terlarang. Pada dasarnya dalam pandangan Islam, seorang pemilik harta (individu) tidak mempunyai hak mutlak terhadap harta yang dimilikinya. Dengan demikian, penggunaan harta tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan.
- c. Pemerataan pemenuhan terhadap kebutuhan.
- d. Dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan, konsumen tidak hanya mementingkan kebutuhan yang bersifat materil semata, tetapi juga kebutuhan yang bersifat immaterial, seperti kehendak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan hubungan sosial yang baik.

¹⁸ Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), Cet. Ke-3, edisi 2, h. 167-168

- e. disamping pemenuhan kepentingan pribadi, juga diperhatikan kepentingan sosial masyarakat.
- f. Sorang konsumen juga harus melihat kepentingan konsumen yang lain, dan kepentingan pemerintah.

Disamping itu, Islam mempunyai konsep tersendiri tentang harta dan penggunaannya. Dalam konsep Islam, harta yang dimiliki manusia semata-mata merupakan milik Allah yang diamanatkan oleh manusia untuk digunakan sesuai dengan petunjuk -Nya dan untuk mengharap ridha-Nya¹⁹.

Penggunaan harta yang dikehendaki Allah adalah dalam batas yang sewajarnya, tidak terlampau sedikit (kikir) dan juga tidak melebihi batas (bermegah-megahan), karena semuanya kelak akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan-Nya. Disamping itu, Allah melalui firman-Nya juga memerintahkan manusia agar menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu dan meringankan beban sesama manusia yang sedang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta.

Perintah Allah SWT .untuk menyisikan sebagian harta orang-orang kaya guna diberikan kepada saudara-saudaranya yang kurang mampu dalam hal kekayaan (ekonomi) misalnya dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, wakaf, memberikan pinjaman (hutang), maupu segala bentuk solidaritas sosial lainnya.

Konsepsi dasar ekonomi Islam mengenai penggunaan harta baik untuk konsumsi maupun lainnya dimaksud untuk mencapai kebahagiaan hidup jangka panjang. Jika konsep ekonomi kapitalis hanya menekankan pada aspek kebahagiaan dunia saja, maka formulasi konsep Islam menginginkan hal yang

¹⁹ A. Dzauli, dkk, *lembaga- lembaga perekonomian umat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), Cet. Ke-1, h. 7

lebih sempurna, yakni tercapainya kebahagiaan hidup didunia ini dan dikehidupan alam akhirat kelak. Karena tujuannya lebih luas dan berjangka panjang, maka Islam membatasi pencarian kesenangan jasmani yang berlebihan.

F. Kredit dalam Islam

Dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, tidak terdapat perbedaan definisi yang signifikan antara kredit dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”²⁰.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah di definisikan sebagai, “ penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”²¹

Kedua definisi tersebut hanya dibedakan pada kata kredit diganti kata pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, kata pinjam- meminjam dihilangkan, kata peminjam untuk melunasi utangnya diganti dengan pihak yang dibiayai untuk

²⁰ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

²¹ *Ibid*

mengembalikan uang atau tagihan tersebut, dan akhirnya kata bunga diganti dengan imbalan atau bagi hasil.

Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan bagi hasil (mudharabah), jual beli (murabahah), dan nama-nama akad fiqih lainnya yang selama ini menjadi kosa kata yang akrab digunakan oleh perbankan syariah? Apakah akad-akad fiqih tersebut merupakan prinsip atau jenis perjanjian bank Syariah?

Ketika berbicara tentang penerapan akad-akad syariah, bank Syariah harus mengacu pada hukum positif yang ada. Menurut UU No 10/1998 dan UU No 23/1999, akad-akad fiqih tersebut adalah prinsip, bukan jenis perjanjian bank syariah. Dalam paradigma ini, bank syariah memberikan fasilitas pembiayaan, bukan menjual atau menyewakan suatu barang.

Sudah saatnya kita membedakan antara berfikir fiqih dengan tataran berfikir positif. Dengan kata lain, ketika berbicara kredit dalam perbankan syariah, terdapat *two level of playing field*, yaitu *sharia level* dan *legal level*. Hal ini bukan sebagai wujud sekularisasi hukum, sebaliknya sebagai upaya mewarnai hukum positif dengan nilai-nilai syariah. Memahami sistematis berfikir hukum positif akan banyak memberikan celah untuk memodifikasinya sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Untuk saat ini, paradigma prinsip memberikan banyak keluasaan untuk mewarnai perbankan syariah dengan berbagai transaksi perbankan. Sebaliknya, kecerobohan mengambil begitu saja akad-akad fiqih untuk dijadikan hukum positif tanpa mempertimbangkan secara komprehensif seluruh bangunan hukum yang ada, dapat berakibat menghambat perkembangan perbankan syariah itu sendiri.

Dikemukakan bahwa keuangan Negara berbeda dengan keuangan swasta dalam satu hal yang sangat penting, berbeda dengan Negara, individu pribadi sedikit sekali menguasai besar kecilnya pendapatan, ia berkewajiban untuk menyesuaikan pengeluaran dan pendapatannya, dan bukan sebaliknya

Tentu saja pernah dikemukakan bahwa dalam batas-batas tertentu individu pribadi dapat menyesuaikan pendapatannya dengan pengeluarannya. Jadi bila lebih dibelanjakan maka lebih banyak uang dapat diperoleh dengan meminjamkan dan meminjam.

Islam telah mengakui ini sebagai syarat yang diperlukan dalam transaksi manusiawi dengan satu perbedaan. Perbedaan ini sebagian timbul karena masuknya unsur moralitas dengan pengambilan kredit .

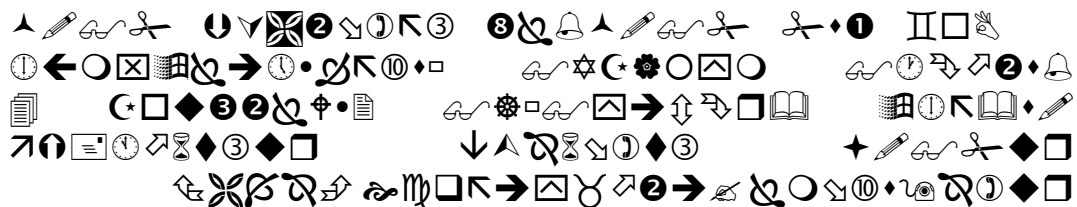
Bila menganalisis berbagai perintah agama islam dengan seksama maka dengan mudah kita dapat memperoleh empat prinsip yang bertalian dengan kredit, yaitu:

1. Prinsip kemurnian
2. Prinsip perjanjian
3. Prinsip pembayaran
4. Prinsip bantuan²²

Demikianlah Islam memandang adanya kredit dalam kehidupan manusia sekarang ini, semuanya tidak terlepas dari peran serta hukum islam, untuk menciptakan adanya keseimbangan. Atau dengan kata lain kredit dapat dikatakan

²² Muhamad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), Cet. Ke-3, edisi 1, h. 217

sebagai proses pinjam meminjam sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Albaqarah
ayat 245



Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Tata Cara Mendapatkan Kredit

Dengan memberikan kredit kepada berbagai sektor perekonomian serta menyerahkan modal kepada berbagai perusahaan maupun instansi- instansi pemerintah maupun sector usaha, bank melancarkan arus produksi barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.

Dalam hal ini bank merupakan pemasok (*supplier*) dari sebagian yang beredar digunakan sebagai alat ukur atau alat pembayaran. Hal tersebut menunjukan bahwa bank terutama bank umum merupakan lembaga keuangan yang sangat penting, dan berperan menjalankan kegiatan ekonomi dan perdagangan, dalam arti lain bank turut mendorong kegiatan ekonomi.

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu haruslah melalui tahapan- tahapan penilaian mulai dari penyajian proposal kredit dan dokumen- dokumen yang diperlukan. Dalam memberikan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak bank meminta kembali keabsahan dokumen atau bahkan menolak.

Proses pemberian kredit pada PT. Bank Riau Cabang Dumai ada beberapa tahap kerja antara lain:

1. Permohonan Kredit
2. Rekomendasi proses analisis

3. Analisis kredit
4. Persetujuan kredit
5. Perjanjian kredit
6. Persetujuan pencairan kredit¹

Langkah- langkah itu diambil agar pemberian kredit tiak disalah gunakan oleh calon debitur. Dan PT. Bank Riau telah melaksanakan prosedur prmbelian kredit yang benar. Pencairan dilakukan hanya sekali, dalam pelaksanaannya dilakukan dua kali.

1. Permohonan Kredit

Pada PT. bank Riau calon debitur yang ingin memohon kredit dapat meminta formulir dan informasi tentang kredit kebagian pemasaran. Setiap calon debitur yang ingin mengajukan kredit harus memenuhi syarat umum operasional permohonan kredit dan setiap jenis kredit berbeda persyaratannya, persyaratan pada kredit konsumtif adalah sebagai berikut:

1) Kredit Aneka Guna

Yaitu kredit yang diberikan kepada pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap.

Syarat umum kredit aneka guna adalah:

- a) mengajukan permohonan dengan mengisi formulir kredit aneka guna yang disediakan oleh bank, serta membubuhkan materi

¹ Sujasdhi, (Pinsi Oprasional PT. Bank Riau Cabang Dumai), *Wawancara*, Dumai 2009

sesuai ketentuan yang berlaku dan diketahui oleh suami atau istri

- b) menyerahkan foto copy dokume-dokumen yang merupakan lampiran persyaratan permohonan kredit aneka guna yang ditetapkan bank
- c) permohonan kredit aneka guna harus menyerahkan persyaratan tambahan yang ditetapkan bank.

Syarat operasional kredit aneka guna:

- a) calon debitur tidak tercatat sebagai debitur bermasalah
- b) kredit aneka guna yang diberikan kepada debitur kolektif perusahaan² swasta besar, yayasan, dan bagian debitur yang berpenghasilan atau gaji atau *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara pimpinan cabang bank dengan bendaharawan lembaga tempat calon debitur berkerja.

2) Kredit Kendaraan bermotor (KKB)

Yaitu kredit yang diberikan kepada pegawai dan pensiun yang berpenghasilan tetap, dan pegawai yang tidak berpenghasilan tidak tetap dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

Syarat umum kredit kendaraan bermotor adalah:

- a) Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir kredit kendaraan bermotor yang disediakan bank, serta membubuhkan

² Nasir, (Costemer Service, PT. Bank Riau Cabang Dumai), *Wawancara*, Dumai 2009

materi sesuai ketentuan yang berlaku dan diketahui oleh suami atau istri

- b) Menyerahkan foto copy dokumen yang merupakan lampiran persyaratan permohonan kredit kendaraan bermotor yang ditetapkan bank
- c) Permohonan kredit kendaraan bermotor harus menyerahkan persyaratan tambahan sebagaimana yang ditetapkan bank.

Syarat operasional kredit kendaraan bermotor adalah:

- a) calon debitur tidak tercatat sebagai debitur bermasalah
 - b) kredit kendaraan bermotor yang diberikan debitur kolektif perusahaan swasta besar, yayasan, dan bagi debitur yang berpenghasilan atau gaji tidak dikuasai bank harus didasari dengan suatu perjanjian kerja sama atau *memorandum of understanding* (MOU) antara pimpinan cabang bank dengan bendaharawan yang diketahui oleh atasan langsung bendaharawan lembaga tempat calon debitur berkerja³.
- 3) Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR

Yaitu kredit yang diberikan kepada pegawai atau pensiun yang berpenghasilan tetap untuk memiliki tanah atau bangunan di atasnya untuk tempat tinggal.

Syarat umum kredit kepemilikan rumah (KPR)

- a) mengajukan permohonan secara tertulis

³ Afni, (Bagian Kredit Aneka Guna), *Wawancara*. Dumai 2009

- b) mengisi formulir permohonan kredit kepemilikan rumah yang disediakan bank serta melengkapi persyaratan- persyaratanya dengan membubuhkan matrai sesuai ketentuan yang berlaku
- c) menyerahkan photo copy dokumen- dokumen yang berkaitan dengan permohonan kredit

Syarat operasional kredit kepentingan rumah (KPR) adalah:

- a) calon debitur tidak tercatat sebagai debitur bermasalah
- b) calon debitur berdomisili diwilayah Riau
- c) berpenghasilan tetap berupa gaji yaitu pegawai Negeri Sipil anggota TNI atau Kepolisian, Pegawai BUMN dan BUMD, dan Pegawai perusahaan besar swasta nasional
- d) telah tercatat sebagai pegawai tetap di instansi atau perusahaan tempat yang bersangkutan kerja
- e) belum memiliki layak huni di wilayah kerajaan, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi atau perusahaan yang bersangkutan
- f) instansi atau perusahaan tempat calon debitur berkerja telah menandatangani MOU atau perjanjian kerja sama dengan PT. Bank Riau dan bagi instansi atau perusahaan bersedia menempatkan sebagian dananya di bank
- g) bagi calon debitur berkerja pada perusahaan swasta besar nasional perusahaannya diwajibkan menyerahkan Cooperation Guarantee (garansi Perusahaan)

h) wajib menjadi nasabah tabungan di PT. Bank Riau⁴

Kredit diberikan kepada PNS saat mereka mengajukan permohonan kredit. Dan melengkapi syarat- syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank. Kapan kredit ini diberikan tergantung kepada kelengkapan dokumen- dokumen yang dilampirkan sebagai persyaratan oleh pihak debitur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jenis kredit yang diberikan bervariasi dan bermacam- macam sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan oleh debitur (nasabah). Diantaranya kredit aneka guna (KAG) seperti: kredit untuk pembiayaan pendidikan, renovasi rumah, pengobatan, pernikahan, dll. Termasuk juga kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit kepemilikan rumah (KPR).

B. Efektifitas Penggunaan Kredit Konsumtif

Seiring dengan aktivitas ekonomi dalam kehidupan manusia, keberadaan asas kegunaan didalamnya memiliki peranan yang sangat signifikan hal ini disebabkan oleh adanya tabiat manusia yang memiliki tingkat preferensi (kecendrungan untuk memilih) yang berbeda-beda. Kodrat manusia yang paling hakiki adalah menjauhi rasa sakit dan mengejar rasa nikmat.

Penggunaan harta baik untuk konsumsi maupun untuk lainnya dimaksud untuk mencapai kebahagiaan jangka panjang, dengan beragam kebutuhan manusia sekarang maka dari kalangan orang-orang yang melebihi kekurangan dana mereka dapat menyimpan uang mereka dengan cara

⁴ Dikutip Dari Buku Panduan Standar Layanan Bank Riau, h. 14

menabung di bank atau di depositokan serta diinvestasikan kepada usaha-usaha yang bersifat produktif. Majunya zaman semakin menuntut umat manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara mereka sendiri yaitu dengan cara meminjam atau mengajukan pembiayaan melalui lembaga-lembaga bank dan lembaga-lembaga keuangan non bank.

Kredit diberikan dengan memakai jaminan atau agunan berupa barang bergerak, barang tetap, jaminan surat-surat berharga dan jaminan pribadi.

Tabel IV.1
Tanggapan responden ketika kredit yang diajukan diterima oleh bank

No	Tanggapan	Frekuensi	%
1	Sangat senang	10	20
2	Senang	25	50
3	Biasa saja	15	30
4	Kecewa	-	
	Jumlah	50	100

Sumber: Data Olahan 1

Dari tabel IV.1 dapat dijelaskan bahwa bahwa kredit yang diajukan ditanggapi oleh nasabah yang jumlah respondenya 50 orang. Dari tanggapan yang menjawab sangat senang yaitu berjumlah 10 responden atau 20%, yang menjawab senang 25 responden atau 50%, sedangkan yang menjawab biasa saja 15 responden atau 30% dan yang menjawab kecewa 0 (nol) atau tidak ada. Jadi dari kesimpulan tanggapan responden adalah senang dengan tanggapan 25 responden atau 50% dari 50 responden yang memberikan tanggapan.

Tabel IV. 2
Tanggapan responden memilih Bank Riau untuk mengajukan kredit

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	%
1	Bunga pinjaman relatif kecil	2	4
2	Pencairan dana cepat	10	20

3	Syarat-syaratnya mudah	20	40
4	Lain-lain	8	16
	Jumlah	50	100%

Sumber: Data Olahan 2

Dari tabel IV.2 dapat dilihat bahwa tanggapan responden memilih Bank Riau dari 50 responden, yang menjawab bunga pinjamannya relatif kecil yaitu 2 responden atau 4%. Yang menjawab pencairan dana cepat 10 responden atau 20% , sedangkan responden yang menjawab syarat-syaratnya mudah 20 responden atau 40% dan yang menjawab lain-lain 8 responden atau 16%. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa dari tanggapan responden dari 50 orang pegawai memilih Bank Riau karena syarat-syaratnya mudah berjumlah 40% dari 100% responden yang memberikan tanggapan.

Tabel IV. 3
Tanggapan Responden Tentang Tingkat Suku Bunga Kredit

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat tinggi	2	4
2	Tinggi	18	36
3	Kompetitif atau sama dengan suku bunga bank lain	25	50
4	Rendah	5	10
	Jumlah	50	100

Sumber: Data Olahan 3

Dari tabel IV. 3 dapat dijelaskan bahwa tingkat suku bunga kredit dapat ditanggapi oleh responden yang berjumlah 50 orang . dari tanggapan yang menjawab sangat tinggi yaitu berjumlah 2 responden atau 4%, responden yang menjawab tinggi berjumlah 18 responden atau 36%, sedangkan yang menjawab kompetitif atau sama dengan suku bunga bank lain 25 responden atau 50%, dan yang menjawab rendah 5 responden atau 10%. Jadi dari kesimpulan tentang tanggapan responden adalah kompetitif

atau sama dengan suku bunga bank lainya dengan tanggapan 25 responden atau 50% dari 50 responden yang memberikan tanggapan.

Tabel IV. 4
Tanggapan responden tentang syarat-syarat pengajuan
kredit oleh Bank

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat sulit	-	-
2	Sulit	2	4
3	Biasa	18	36
4	Mudah	30	60
	Jumlah	50	100

Sumber: Data Olahan 4

Dari tabel IV.4 dapat dijelaskan bahwa syarat-syarat pengajuan kredit ditanggapi 50 orang responden . dari tanggapan yang menjawab sangat sulit 0 (nol) atau tidak ada, yang menjawab sulit 2 responden atau 4%, sedangkan yang menjawab biasa 18 responden atau 36%, dan yang menjawab mudah berjumlah 30 responden atau 60%. Jadi dari kesimpulan tentang syarat-syarat kredit tanggapan responden adalah mudah dengan tanggapan 30 responden atau 60% dari 50 responden yang memberikan tanggapan.

Tabel IV. 5
Tanggapan Responden Terhadap Keperluan Yang diperolehnya

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	%
1	Renovasi rumah	30	60
2	Biaya pendidikan	10	20
3	Pembelian kendaraan bermotor	6	12
4	Lain-lain	4	8
	Jumlah	50	100

Sumber: Data Olahan 5

Dari tabel IV.5 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden terhadap keperluan yang diperolehnya dengan jumlah responden 50 orang yaitu, dari tanggapan yang menjawab untuk renovasi rumah berjumlah 30 responden

atau 60%, yang menjawab untuk biaya pendidikan 10 responden atau 20%, sedangkan yang menjawab untuk pembelian sepeda motor 6 responden atau 12%, dan yang menjawab lain-lain sebanyak 4 responden atau 8%. Jadi dari kesimpulan tanggapan responden adalah untuk renovasi rumah dengan tanggapan 30 responden atau 60% dari 50 responden yang memberikan tanggapan.

Tabel IV. 6
Tanggapan Responden Besar Kredit yang Diterimanya

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	%
1	<10.000.000	-	-
2	10.000.000-40.000.000	28	56
3	50.000.000-100.000.000	22	44
4	>100.000.000	-	-
	Jumlah	50	100

Sumber: Data Olahan 6

Dari tabel IV. 6 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden terhadap besarnya kredit yang diterima dengan jumlah responden adalah 50 orang. Dari tanggapan yang menjawab < 10.000.000 yaitu berjumlah 0 (nol) atau tidak ada, yang menjawab 10.000.000-40.000.000 berjumlah 22 responden atau 44%, sedangkan yang menjawab 50.000.000-100.000.000 berjumlah 28 responden atau 56%, dan yang menjawab > 100.000.000 berjumlah 0% atau tidak ada. Dari kesimpulan tanggapan responden adalah 10.000.000-40.000.000 dengan tanggapan 28 responden atau 56% dari 50 responden yang memberikan tanggapan.

Tabel IV. 7
Tanggapan Responden Terhadap Jangka Waktu
Pencairan Dana Kredit

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	%
1	< 7 hari	25	50
2	7-13 hari	15	30

3	14-21 hari	10	20
4	>21 hari	-	-
	Jumlah	50	100

Sumber: Data Olahan 7

Dari tabel IV. 7 dapat dijelaskan bahwa jangka waktu pencairan dana kredit ditanggapi oleh nasabah yang berjumlah responden adalah 50 orang, dari tanggapan yang menjawab < 7 hari yaitu berjumlah 25 responden atau 50%, yang menjawab 7-13 hari 15 responden atau 30%, sedangkan yang menjawab 14-21 hari 10 responden atau 20% dan yang menjawab > 21 hari 0 (nol) atau tidak ada. Jadi dari kesimpulan tanggapan responden adalah < dari 7 hari dengan tanggapan 25 responden atau 50% dari 50 responden yang memberikan tanggapan.

Tabel IV. 8
Tanggapan Responden Tentang Batas Waktu Pelunasan

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	%
1	<12 bulan	-	-
2	12-24 bulan	6	12
3	25-36 bulan	14	28
4	>36 bulan	30	60
	Jumlah	50	100

Sumber: Data Olahan 8

Dari tabel IV. 8 dapat dijelaskan bahwa batas waktu pelunasan kredit ditanggapi oleh responden yang berjumlah 50 orang. Dari tanggapan yang menjawab < 12 bulan yaitu berjumlah 0 (nol) atau tidak ada, yang menjawab 12-24 bulan 6 responden atau 12%, sedangkan yang menjawab 25-36 bulan 14 responden atau 28%, dan yang menjawab > 36 bulan 30 atau 60% . jadi dari kesimpulan tanggapan responden adalah > 36 bulan dari tanggapan 30 responden atau 60% dari 50 Orang responden yang memberikan tanggapan.

Tabel IV. 9
Tanggapan Responden Tentang Banyaknya Mendapat Fasilitas Kredit

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	%
1	Lebih dari 2 kali	20	40
2	Cukup dari 2 kali	15	30
3	Kurang dari 2 kali	10	20
4	Cukup dari 1 kali	5	10
	Jumlah	50	100

Sumber: Data Olahan 9

Dari tabel IV. 9 dapat dijelaskan bahwa banyaknya mendapat fasilitas kredit ditanggapi oleh responden yang berjumlah 50 orang. Dari tanggapan yang menjawab lebih dari 2 kali yaitu berjumlah 20 responden atau 40%, yang menjawab cukup dari 2 kali 15 responden atau 30%, sedangkan yang menjawab kurang dari 2 kali 10 responden atau 20% dan yang menjawab cukup dari 1 kali sebanyak 5 responden atau 10%. Jadi dari kesimpulan tanggapan responden adalah lebih dari 2 kali dengan tanggapan 20 responden atau 40% dari 50 orang responden yang memberikan tanggapan.

Tabel IV. 10
Tanggapan Responden tentang Penggunaan Kredit Untuk Keperluan Lain
Diluar Prosedur Pemohonan Awal Kredit

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	%
1	Tidak pernah	7	14
2	Kadang-kadang	12	24
3	Pernah	23	46
4	Sering	8	16
	Jumlah	50	100

Sumber: Data Olahan 10

Dari tabel IV. 10 dapat dijelaskan bahwa penggunaan kredit untuk keperluan lain diluar prosedur permohonan awal ditanggapi oleh responden

sebanyak 50 orang. Dari tanggapan yang menjawab tidak pernah berjumlah 7 responden atau 14%, yang menjawab kadang-kadang 12 responden atau 24%, sedangkan yang menjawab pernah sebanyak 23 responden atau 46%, dan yang menjawab sering 8 responden atau 16%. Jadi dari kesimpulan tanggapan responden adalah pernah dengan tanggapan 23 responden atau 46% dari 50 orang responden yang memberikan tanggapan.

Dari hasil rekapitulasi jawaban responden pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat dikatakan “kurang efektif”, hal ini terlihat dari hasil persentase jawaban responden yang berasal dari pegawai tergambar dari seringnya mendapat fasilitas kredit dan seringnya penggunaan kredit untuk keperluan lain diluar prosedur permohonan kredit.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan penggunaan kredit yang pada awalnya untuk renovasi rumah, pendidikan, pembelian kendaraan bermotor malahan terkadang digunakan untuk membeli keperluan harian dan juga digunakan untuk hal- hal yang tidak ada hubungannya dengan tujuan pemberian kredit oleh pihak bank. Seperti pembelian barang- barang kebutuhan sehari- hari, membeli perhiasan dan perabot rumah tangga⁵.

C. Dampak Perekonomian PNS Dinas Kesehatan

Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki suatu barang/ jasa bisa muncul karena factor kebutuhan ataupun factor keinginan. Kebutuhan ini terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara sempurna. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang

⁵ Maini Asna, (Pegawai Dinas Kesehatan), *wawancara*, Dumai 2009

diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna, berbeda dan lebih mulia dari pada makhluk- makhluk lainnya.

Alasan pegawai memilih Bank Riau untuk melakukan pinjaman adalah mereka merasa terikat dengan Bank karena mereka adalah pegawai PEMDA yang pembayaran gajinya melewati Bank Pembanguna Daerah (BPD)⁶. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak mereka harus melakukan pembiayaan atau permohonan kredit untuk memenuhi kebutuhan meskipun bunganya cukup tinggi untuk jenis pembiayaan ini.

Disisi lain, keinginan adalah terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia atau suatu barang. Misalnya ketika seseorang membangun suatu rumah ia menginginkan adanya warna yang nyaman, interior yang rapi dan indah, ruangan yang loggar, dan sebagainya. Kesemua hal ini belum tentu menambah fungsi suatu rumah tinggal, namun akan memberikan suatu kepuasan bagi pemilik rumah. Keinginan terkait dengan suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu barang atau jasa, dan hal ini bersifat subjektif tidak bisa dibandingkan antara satu orang dengan orang orang lain.

Secara umum, terhadap pemenuhan kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual atau pun material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat piskis disamping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan masalah sekaligus

⁶ Yusri Aziz, (Bendahara Dinas Kesehatan), *wawancara*. Dumai 2009

kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata.

Manfaat bagi konsumen ini juga akan berhubungan secara langsung dengan besarnya manfaat dari barang/ jasa yang dikonsumsi, hubungan ini bersifat intraksional. Yakni barakah akan dirasakan besar untuk kegiatan yang menghasilkan manfaat yang besar pula, begitu sebaliknya.

Dampak perekonomian ekonomi pegawai dapat dilihat dari factor kebutuhan dan keinginan dalam melakukan pembiayaan, setelah melakukan pinjaman apakah keadaan perekonomian mereka Tetap atau seperti sebelum melakukan pinjaman. Bahkan bisa mengalami perubahan, dalam arti kata apakah pegawai merasa berat dalam mengembalikan kredit beserta bunganya pada setiap bulanya.

Menurut keterangan seorang pegawai Dinas Kesehatan factor yang mempengaruhi mereka melakukan pembiayaan adalah:

1. Adanya factor kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi dengan segera seperti Biaya berobat dan Pendidikan.
2. Prosesnya mudah, dan juga persyaratannya mudah
3. Proses pencairannya cepat
4. Pembayaran angsuran potongan langsung melalui rekening
5. Biaya ADM, Provisi, dan ansuransinya relative kecil meskipun bunganya tergolong Tinggi.
6. DII⁷

⁷ Ike Amilla, (Pegawai Dinas Kesehatan), *Wawancara*, Dumai 2009

Dampak dari pemberian kredit bagi perekonomian pegawai Pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat dikatakan “berubah” karena mereka merasa terbantu dengan adanya pemberian kredit tersebut. Diantaranya mereka memiliki rumah yang layak huni dan kendaraan pribadi yang dapat mendukung kenyamanan mereka untuk melakukan aktifitas sehari-hari serta terjaminnya pendidikan bagi anak-anak mereka demi terciptanya kesejahteraan dimasa yang akan datang⁸.

Akan tetapi penghasilan mereka secara otomatis berubah setelah melakukan pinjaman, berubah dalam artian berkurang. Karena setelah sebulan dari masa pencairan kredit, mereka harus mulai mencicil angsuran bulanan dengan cara gaji pegawai langsung dipotong oleh bank sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian kredit. Sebagai bukti pembayaran pihak bank memberikan rekening koran kepada bendaharawan yang diberikan wewenang sebagai perwakilan dari keseluruhan pegawai yang meminjam.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Efektivitas Penggunaan Kredit Konsumtif

Keunikan hukum Islam ialah karena keluasaan dan kedalaman asas-asasnya mengenai seluruh masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa. Seluruh dasar dan sumber hukum Islam merupakan mukjizat yang tetap dan kekal⁹. Mukjizat dalam arti bahwa hukum Islam tidak hanya dapat

⁸ Agus Widayat (Ka. Dinas Kesehatan), *wawancara*, Dumai 2009

⁹ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakhti Wakaf, 1993), h. 28

dibandingkan dengan hukum pasang surut, tetapi juga dengan hukum gaya berat yang sederhana, dan eksak.

Hukum Islam juga tidak lupa membahas masalah-masalah kehidupan ekonomi masyarakat khususnya untuk kesejahteraan umatnya. Maka dari sinilah lahir lembaga-lembaga keuangan yang tumbuh dengan adanya peraturan dan perundangan yang tercipta melalui campur tangan pemerintahan. Yang secara tidak langsung memberikan sumbangan untuk pembangunan dan stabilitas ekonomi dengan salah satu bentuk pembiayaan, yaitu kredit.

Dalam pandangan hukum Islam kredit dibolehkan dalam bentuk pinjaman atau (Ariyah). Kredit dalam Islam sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur. Baik itu jual beli maupun dalam pinjam- meminjam¹⁰.

Adapun syafi'iyah bahwa rukun ariyah adalah sebagai berikut

1. kalimat mengutangkan (lafaz), seperti: "saya utangkan benda ini kepada kamu" dan yang menerima. Berkata: "saya mengaku berutang benda anu kepada kamu", adapun syarat bendanya adalah sama dengan syarat benda- benda dalam jual beli.
2. Mu'ir yaitu orang yang mengutangkan atau berpiutang dan musta'ir yaitu orang yang menerima utang, syarat bagi mu'ir dan musta'ir adalah:
 - Baliqh, maka batal ari'yah yang dilakukan anak kecil

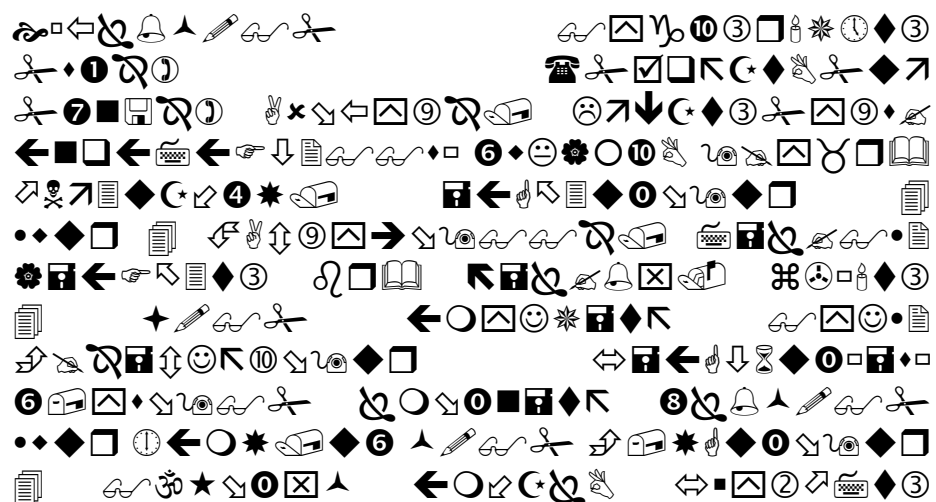
¹⁰ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 139

- Berakal, maka batal ari'yah yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila
- Orang tersebut tidak dimahjur (dibawah curatelle), maka tidak sah ari'yah yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah perlindungan (*curatelle*). Seperti pemborosan.

3. Benda yang diuangkan, pada rukun ketiga ini disyaratkan dua hal, yaitu:

- bahwa materi yang dipinjamkan dapat bermanfaat, maka tidak sah ari'yah yang meterinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur, sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi.
- Bahwa pemanfaatan itu dibolehkan maka batal ari'yah yang mengambil manfaat materinya dibatalkan oleh syara seperti meminjam benda-benda najis. Didalam Al- Qur'an menjelaskan tentang perniagaan yang termasuk kewajiban membayar hutang:

Al- Baqarah ayat 282



bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu¹¹.

Bagian pertama dari nas itu menjelaskan tentang urusan mencakup pembayaran berdasarkan tenggang waktu dan bagian kedua berhubungan dengan masalah perdagangan. Yang pertama merupakan mengharuskan dalam pembuatan dokumen, sedangkan masalah perdagangan yang dilakukan secara tunai tidak dibebani untuk membuat dokumen kecil kesaksian lisan, malah kesaksian ini seperti ini tidak diperlukan sekiranya pihak-pihak yang terlibat saling mempercayai satu sama lain.

Ayat diatas memberikan perlindungan terhadap pertentangan yang mungkin timbul karena ketiadaan dokumen dan saksi yang mengizinkan sistem pinjaman dalam perdagangan dalam jangka waktu tertentu.

¹¹ Depatemen RI, *Terjemahan Al- Qur'an*, (CV. Penerbit J. Art: 2003)

Secara epistemology, salaf mengandung arti sebagai suatu pinjaman yang dikembalikan tanpa keuntungan bagi pemberi hutang¹². Dalam pengertian yang luas ia meliputi pinjaman untuk tempo yang khusus, yaitu pinjaman jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tetapi jika dibayarkan dengan segera maka disebut *qardh* ataupun wajib membayar karena ada tagihan.

Pengertian *qardh* menurut bahasa adalah memotong. Sebab dikatakan demikian karena (kekayaan) harta itu adalah betul- betul dipotong apabila diberikan pinjaman.

Abu Rafi menceritakan bahwa Nabi s.a.w. telah meminjam seekor unta muda, apabila unta lain diberikan kepadanya, Abu Rafi meminta menyerahkan unta yang sama atau gantinya kepada orang yang meminjamkannya unta itu. Abu Rafi memberitahu Nabi s.a.w. yang dia tidak menemui unta yang muda serupa dengan jenis unta yang dipinjamkan itu karena semuanya adalah jenis yang baik. Nabi s.a.w. menyuruh Abu Rafi memberi unta yang baik tadi sebagai gantinya untuk unta yang dipinjamnya.

Sebagai dasar rujukan diungkapkan beberapa buah hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ سَرَهُ
 أَنْ يُعْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيُقْسِرْ عَنْ مَقْسِرٍ
 أَتَمَّعَ عَنْهُ (رواه المسلم)

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 105

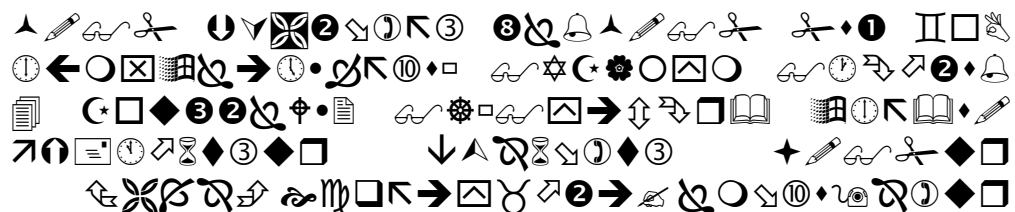
“Diriwayatkan dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah S.A.W. Bersabda: mereka yang menginginkan pertolongan Allah pada peradilan hari kiamat haruslah ia menolong orang-orang yang berhutang kepadanya atau menghapuskan hutang itu (baik sebagian atau seluruhnya)” (Riwayat Muslim)

عَنْ حَدِيثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَجُلًا
كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَفِيضَ رُوحَهُ قِيلَ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ
مِنْ خَيْرٍ قَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا عِزًّا لِي كُنْتُ أَبَايَةَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا وَأَجَارْتُهُمْ
فَنُظِرَ الْمَوْسِرَ وَاجْتَاوَزَ عَنِ الْمَغْسِرِ فَأُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْمُسْلِمُ)

“Diriwayatkan dari Huzaiifah RA bersabda Rasulullah S.A.W. ada seorang sebelum kamu(dimuka bumi ini), malaikat yang datang mencabut nyawanya kemudian bertanya. “pernahkah engkau berbuat baik?” Dia menjawab: “Aku tidak tahu”. Dia menjawab lagi. “ saya masih belum mengingat apa- apa kecuali saya biasa berdagang dengan masyarakat dan memberikan kepada mereka pinjaman. Saya bersedia kepada mereka kelonggaran kepada mereka yang kaya (berada) dan menghapuskannya terhadap orang- orang miskin”, karena adanya keterangan ini dia dimasukkan ke syurga”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)¹³.

Mazhab maliki, yang menyatakan bahwa *qardh* merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya belas kasihan, dan bukan merupakan bantuan (ari'yah) atau pemberian (hibah), tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.

Mazhab Syaf'I berpendapat bahwa *qardh* sebagai hasan atau baik yaitu dirujuk kepada Al- Qur'an al- baqarah 245

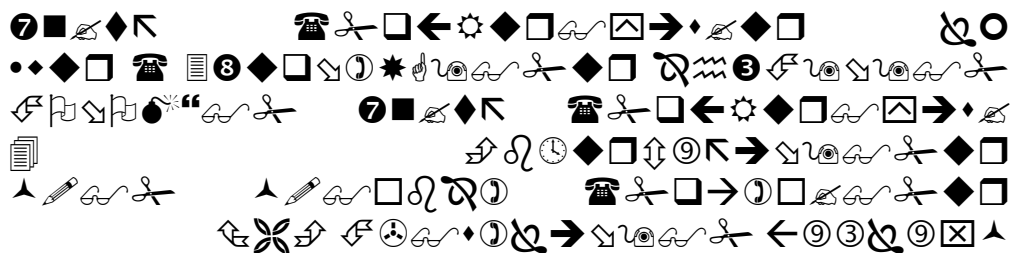


¹³ Ibid

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."

Menurut mazhab Hambali juga berpendapat suatu pindahan hak milik yang mutlak, jadi untuk menggantinya haruslah serupa atau gantian.

Sebagai lembaga keuangan masyarakat biasa yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba usaha, dalam islam tolong menolong dan saling membantu sangatlah dianjurkan dan bisa menjadi wajib apabila ada disekitar kita yang sangat memerlukan bantuan dalam hal kebaikan demikian halnya tolong menolong memberikan pinjaman kredit atau uang kepada orang yang memerlukannya seperti masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak, pendidikan yang terjamin, kesejahteraan dalam bidang kesehatan, dengan produk kredit konsumtif. Ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam Qs Al- Maidah ayat 2. :



Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

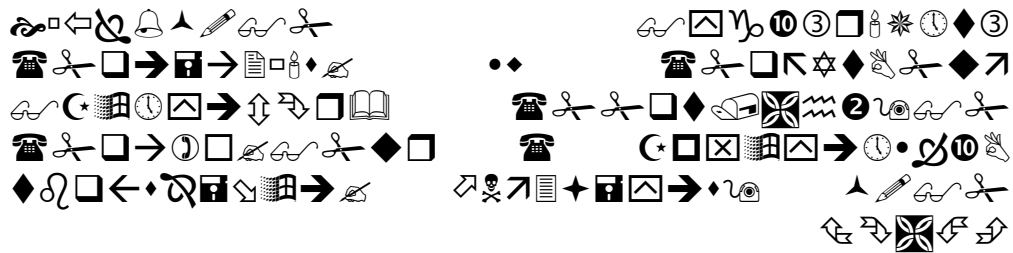
Sebagai mana kita ketahui bahwa Bank Riau Cabang Dumai merupakan bank yang beroperasi secara konvensional. Produk- produknya juga beroperasi secara konvensional, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pengembalian kredit konsumtif menggunakan tingkat suku bunga tertentu.

Bebicara masalah bunga kredit sudah sejak dahulu menjadi perdebatatan dikalangan ulama cendikiawan muslim. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh perbedaan “metode” dan “analogi” hukum yang digunakan, apakah bunga bank itu identik dengan riba?

Menurut istilah teknis, riba bararti tumbuh dan membesar. Secara umum pengertian riba yaitu pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam¹⁴.

Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda, para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut.

Allah SWT berfirman dalam Qs. Ali Imran ayat 130



¹⁴ Yusuf Al- Qaradhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Media Eka Sarana), h. 118

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda¹⁵ dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Pengertian senada juga disampaikan oleh jumhur ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhab fiqhiyah, diantaranya sebagai berikut:

Badrd-Din Al-Ayni, pengarang umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari: “Prinsip utama dalam riba adalah penambahan, menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis rill”.

Imam Jarakhasi dari mazhab Hanafi: “riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam traksaksi bisnis tanpa adanya iwad (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut”.

Rughib al- Asfahani: “riba adalah penambahan atas harta pokok”.

Imam an- Nawawi dari mazhab Syafi’i: “ riba adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman”.

Imam Ahmad bin Hambal: “ketika beliau ditanya tentang riba, ia menjawab sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jika tidak

¹⁵ yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya Haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiyah dan fadhl. riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiyah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

mampu melunasi, ia harus menambah dana, (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan¹⁶”.

Pinjaman atau ‘ariyah menurut bahasa adalah pinjaman, sedangkan menurut istilah ‘ariyah ada beberapa pendapat:

Menurut Hanafiyah ialah” memiliki manfaat secara cuma- cuma”

Menurut Malikiyah ialah” memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan”

Menurut Syafi’iah ialah” kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya”

Menurut Hanabilah ialah “ kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya¹⁷”.

Dengan dikemukakan definisi- definisi menurut para ahli diatas, kiranya dapat dipahami bahwa meskipun menggunakan redaksi berbeda namun materi permasalahannya dari definisi tentang ‘ariyah tersebut sama. Jadi, yang dimaksud dengan ‘ariyah adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma (gratis), bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, hal ini tidak dapat disebut ‘ariyah (pinjaman)

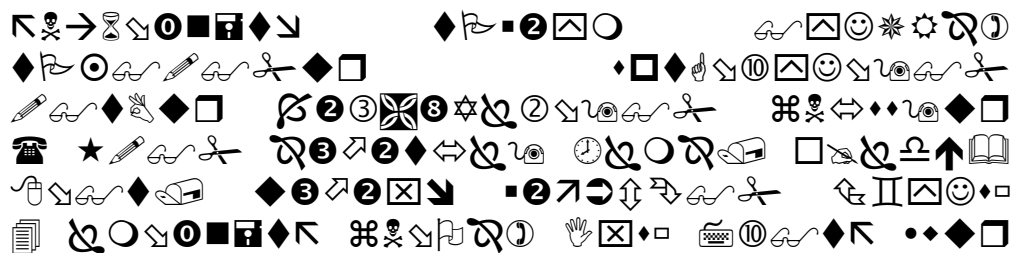
Kita sebagai umat islam yang ada di Indonesia sudah mempunyai lembaga yang mengkaji dan berijtihad masalah- masalah agama Islam itu

¹⁶ Muhammad Syafi’I, Antonio, Bank syari’ah Dari Teori Kepraktik, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), h. 38-41

¹⁷ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 91-92

yaitu lembaga MUI (Majlis Ulama Indonesia) yang lebih mengetahui dan mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi umat Islam yang ada di Indonesia.ada pun keputusan fatwa MUI tentang masalah riba yaitu praktek pembungaan uang ini termasuk riba memenuhi kriteria riba yang terjadi zaman Rasulullah yaitu riba Nasiah. Dengan demikian praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram baik dilakukan oleh bank asuransi, pasar modal, penggadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun oleh individu.

Islam mempersempit wilayah haram, akan tetapi setelah itu, bersikap keras dalam masalah haram. Dengan menutup segala pintu yang mengantarkan kepadanya baik secara terang- terangan maupun tersembunyi. Apa yang mengantarkan kepada yang haram adalah haram, yang membantu kepada yang haram adalah haram. Meskipun demikian, Islam tidak melalikan kebutuhan- kebutuhan hidup dan kelemahan manusia. Karena itu ia pun menghormati keadaan darurat yang bisa ditolelir, mengenai kelemahan manusia dalam kondisi darurat ia membolehkan seorang muslim menikmati berbagai larangan dan menghilangkan kondisi darurat itu, dan memelihara dirinya dari kebiasaa. Firman Allah SWT dalam Qs. Al- Baqarah ayat: 173



Artinya: “..Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..”.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada Bab- bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu

1. Untuk mendapatkan kredit pada PT. Bank Riau Cabang Dumai debitur harus memenuhi syarat- syarat yang diajukan oleh bank dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Debitur termasuk salah satu pegawai yang berpenghasilan tetap dan tidak tercatat sebagai kreditur yang bermasalah.
2. Efektivitas penggunaan kredit konsumtif oleh PNS di Lingkungan Dinas kesehatan Kota Dumai dapat dinilai masih kurang efektif. Dampak dari perekonomian pegawai setelah melakukan pinjaman kredit konsumtif pegawai merasa terbantu sekaligus merasa terbebani dengan kredit tersebut. Karena mereka harus membayar angsuran dengan bunga yang cukup tinggi.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap efektifitas penggunaan kredit konsumtif pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat dikatakan belum sesuai dengan syariat hukum Islam karena masih ada yang menyalahgunakan dana kredit diluar akad perjanjian. Perbuatan tersebut disebut khianat dan orang yang melakkannya disebut penghianat.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terkait dengan efektifitas penggunaan kredit konsumtif penulis menyarankan kepada:

1. Bagi Pegawai Dinas Kesehatan atau pun masyarakat bahwasanya kredit konsumtif ini walaupun pada dasarnya membantu tetapi menurut islam tetaplah tidak boleh karena didalamnya terdapat riba yang jelas- jelas telah dilarang. Dan jika pegawai ingin menggunakan kredit hendaklah sesuai dengan prosedur dan ketentuan syariat Islam
2. seharusnya dana yang diberikan oleh pihak bank hendaknya digunakan sesuai dengan ketentuan perjanjian awal permohonan kredit. Sehingga, kebutuhan dapat terpenuhi secara maksimal dan tidak adanya unsure penyalahgunaan dana yang diberikan.
3. Kepada Bank Riau hendaklah dalam membantu masyarakat tidak memberatkan mereka dengan memberikan bunga kredit yang cukup tinggi, selain itu bank harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah. Dan sebaiknya dilakukan pengawasan penggunaan kredit itu sendiri demi terciptanya kesejahteraan masyarakat sekarang dan dimasa yang akan datang, tanpa harus terus menerus tergantung pada pinjaman kredit dalam memenuhi kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, dkk, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- A. Perwataatmadja, Karnaen, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992)
- Abdul Manan, Muhammad, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993)
- Al-Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Jakarta: Media Eka Sarana, 2004)
- Dokumentasi Bank Riau Cabang Dumai*
- Dokumentasi Dinas Kesehatan Kota Dumai*
- Hafidhuddin, Didin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003)
- Haider Naqvi, Nawab, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: Penerbit Balai Pustaka 1993)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002)
- Karim, Adiwarman A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bina Aksara, 1994)
- M. Strees, Richard, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Air Langga, 1980)
- Mandala Manurung, dkk, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, (Jakarta: FEUI, 2004)
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI Press, 2007)
- Mudrajad Kuncoro Suharjono, *Menejemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2002)

- Muhamad, *Lembaga- Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Mujahiddin, Ahmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Safi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Sholehuddin, Muhammad, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Sumardi, Muljanto, *Sumber Pendapatan, Kebutuhan Pokok dan Prilaku Menyimpang*, (Jakarta: CV. Raja Wali, 1982)
- T. Hani Handoko, *Organisasi Perusahaan, Teori, Struktur, dan Prilaku*, (Yogyakarta: BPFE, 2000)
- Tunggal, Hadi Setia, *Pokok-pokok Kepegawaian Berserta Peraturan Pelaksanaanya*, (Jakarta: Harvarindo 2006)
- Tunggal, Hadi Setia, *Undang-Undang Kepegawaian*, (Jakarta: Harvarindo, 2006)
- Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002)

DAFTAR TABEL

Table D. 1 Distribusi jenis kelamin pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Dumai

Table D. 2 Distribusi Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai

Tabel D. 3 Distribusi jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai Berdasarkan
Pangkat /Golongan

Tabel D. 4 Distribusi Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai Berdasarkan Masa
Kerja

Table D. 5 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai Berdasarkan Kelompok Umur

Table D.6 Distribusi Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kota Dumai Berdasarkan Tingkat
Penghasilan/ Bulan

Table IV. 1 Tanggapan responden ketika kredit yang diajukan diterima oleh bank

Table IV. 2 Tanggapan responden memilih Bank Riau untuk mengajukan kredit

Table IV. 3. Tanggapan Responden Tentang Tingkat Suku Bunga Kredit

Table IV. 4 Tanggapan responden tentang syarat-syarat pengajuan kredit oleh Bank

Table IV. 5 Tanggapan Responden Terhadap Keperluan Yang diperolehnya

Tabel IV. 6 Tanggapan Responden Besar Kredit yang Diterimanya

Table IV. 7 Tanggapan Responden Terhadap Jangka Waktu Pencairan Dana Kredit

Table IV. 8 Tanggapan Responden Tentang Batas Waktu Pelunasan

Table IV. 9 Tanggapan Responden Tentang Banyaknya Mendapat Fasilitas Kredit

Table IV. 10 Tanggapan Responden tentang Penggunaan Kredit Untuk Keperluan Lain
Diluar Prosedur Pemohonan Awal Kredit

DAFTAR TABEL

Gambar 3.1 Struktur Organisasi

ANGKET PENELITIAN

Nama :
Umur :
Jabatan :

Ketentuan Pengisian

1. Istilah Quisioner berikut dengan melingkari atau menyilang jawaban yang Bapak /Ibu anggap paling benar
2. Quisioner ini digunakan untuk kepentingan penelitian, oleh karena itu pengisian yang sesuai sangat diharapkan

Pertanyaan :

1. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu ketika kredit yang diajukan diterima oleh Bank ?
 - a. Sangat senang
 - b. Senang
 - c. Biasa saja
 - d. Kecewa
2. Apa alasan Bapak/Ibu memilih Bank Riau untuk mengajukan kredit ?
 - a. Bunga pinjaman relative kecil
 - b. Pencairan dana cepat
 - c. Syarat-syaratnya mudah
 - d. Lain-lain
3. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai tingkat suku Bunga kredit ?
 - a. Sangat Tinggi
 - b. Tinggi
 - c. Kompetitif
 - d. Rendah
4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai syarat-syarat pengajuan kredit oleh Bank ?
 - a. Sangat Sulit
 - b. Sulit
 - c. Biasa
 - d. Mudah
5. Apa tujuan Bapak/Ibu memperoleh kredit pada tersebut ?

- a. Renovasi Rumah
 - b. Biaya Pendidikan
 - c. Pembelian Kendaraan Bermotor
 - d. Lain-lain
6. Berapa besarkah kredit yang Bapak/Ibu peroleh dari Bank ?
- a. <10.000.000
 - b. 10.000.000 - 40.000.000
 - c. 50.000.000 - 100.000.000
 - d. >100.000.000
7. Berapa lamakah Jangka waktu pencairan dana kredit yang Bapak/Ibu ajukan ?
- a. <7 Hari
 - b. 7 - 13 Hari
 - c. 14 - 21 Hari
 - d. > 21 Hari
8. Berapa lamakah jangka waktu perlunasan kredit yang Bapak/Ibu peroleh ?
- a. <12 Bulan
 - b. 12 - 24 Bulan
 - c. 26 - 36 Bulan
 - d. >36 Bulan
9. Berapa kali Bapak/Ibu mendapat fasilitas kredit dari Bank?
- a. Lebih dari 2 kali
 - b. Cukup dari 2 kali
 - c. Kurang dari 2 kali
 - d. Cukup dari 1 kali
10. Pernahkah kredit yang diberikan kepada Bapak/Ibu digunakan untuk keperluan lain?
- a. Tidak pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Pernah
 - d. Sering